

Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Propinsi Riau)

Sudarno

STIE Pelita Indonesia Pekanbaru

M. Syafi'i Idrus

Ubud Salim

Djumahir

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

***Abstract:** This research aims to uncover and analyze : (a) whether capital investment could help to improve financial performance, efficiency and has a potential to create the impetus to create asset growth; (b) whether growth of assets could improve the financial performance and create an opportunity to make an efficiency, and (c) whether efficiencies can improve the financial performance of the LGOE of the province of Riau. This study uses quantitative and qualitative methods supported by an open form of questionnaires and interviews. The results of this study, as follows : (1) capital investments have a high power to push financial performance but it has a negative relationship, (2) asset growth has not been capable of improving its financial performance but has a positive relationship, (3) efficiency can improve financial performance but it has a negative relationship, (4) capital investment is potentially to create high efficiency but it has a negative relationship, (5) asset growth does not have great opportunities to improve efficiency and it has a negative relationship, and (6) capital investment does not have the impetus to create asset growth, but it has a negative relationship.*

***Keywords:** Investment, Asset Growth, Efficiency, Financial Performance*

Salah satu tuntutan reformasi adalah upaya mewujudkan *good corporate governance* dalam sistem pembangunan ekonomi nasional. Upaya yang dikembangkan adalah dalam bentuk pembangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling dasar di daerah propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Ikhsan (2007), bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang memiliki *good governance*, maka perlu dibina jiwa *entrepreneurship* pada pemerintah terutama pemerintah daerah. Begitu pentingnya penerapan *good*

corporate government dalam pengembangan perusahaan termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) memberikan dorongan tersendiri guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Senada dengan hal tersebut Maksum (2005) dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada Universitas Sumatera Utara mengungkapkan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan *good corporate governance* antara lain: (1) dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat; (2) *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarnya atau sekurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam

Alamat Korespondensi:

Sudarno, STIE Pelita Indonesia
Jl. Jend. A. Yani No 78-88 Pekanbaru
E-mail: sdntalenta@yahoo.com

pengelolaan perusahaan; (3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi; (4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada point 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima; (5) Karena dalam praktek *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*); (6) Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholder* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik; (7) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Guna mengemban dan menerapkan *corporate governance* agar memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan perusahaan khususnya perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah dapat terwujud dengan baik, maka sangat diperlukan jiwa *entrepreneurship* mengemuka di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang saham utama BUMD/Perusahaan Daerah. Jiwa *entrepreneurship* hendaknya juga dimiliki oleh pihak manajemen sebagai pengelola BUMD/Perusahaan Daerah.

Ditilik dari produk hukum yang ada, BUMD telah dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD-nya.

Analogi yang cocok untuk sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini adalah

melimpahnya sumber daya yang dipercayakan oleh pemerintah daerah ke BUMD yang dimaksud, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Persoalan yang dialami BUMD di banyak tempat selalu berputar pada persoalan dugaan masih tingginya inefisiensi, KKN, dan lemahnya penerapan *good corporate governance* (Ocuviarta:2006). Pernyataan tersebut tidak terlepas juga Badan Usaha Milik Daerah propinsi dan kabupaten/kota di Riau saat ini.

Problematisa BUMD khususnya di Riau tidak jauh berbeda dengan BUMD di seluruh Indonesia. Intinya masih miskin keuntungan yang pada gilirannya belum maksimal memberikan kontribusi PAD dan dinilai oleh berbagai kalangan masih berkinerja rendah. Kondisi senada diungkapkan dengan jelas oleh Kuncoro dalam Harun (2007), bahwa ada 5 (lima) ketergantungan daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

- Kurang berperannya BUMD sebagai sumber keuangan daerah, ini terbukti bahwa BUMD di Riau masih banyak yang merugi.
- Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, semua pajak besar diambil oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya yang kecil-kecil saja.
- Walau pajak daerah/retribusi beragam namun sangat sedikit yang dapat diandalkan.
- Bersifat politis, yaitu pemerintah pusat khawatir bila daerah mempunyai keuangan yang kuat maka terjadi disintegrasi, daerah akan berupaya keluar dari kekangan pusat.
- Kelemahan pusat dalam memberikan subsidi kepada daerah, baik cara perhitungan maupun cara pelaksanaannya.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dijelaskan, yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima daerah dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga dari sumber yang berasal dari pinjaman daerah. Sementara PAD itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD/Perusahaan daerah, dan PAD lainnya yang sah. Ternyata dari 4 (empat) sumber yang dimaksud, laba BUMD dan PAD lainnya yang sah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan atau dalam arti masih belum berperan

secara positif (Haryanto, 2006). Hal senada juga lebih ditegaskan oleh Sunarsip (2009), bahwa Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia masih banyak menghadapi permasalahan yang pelik dan rumit. Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Dari aspek *governance*, misalnya, institusi BUMD masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah, padahal BUMD bukanlah institusi pemerintah, implikasinya bahwa berbagai kewajiban yang melekat pada pemerintah melekat pula pada BUMD.
- BUMD juga masih harus menjalani pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK karena alasan keuangan negara, padahal, sebagai perseroan terbatas, BUMD juga diperiksa oleh kantor akuntan publik yang independen.
- Tidak adanya *equal treatment* bagi BUMD (yaitu sebagai perusahaan yang dituntut harus laba) menyebabkan BUMD tidak dapat bersaing secara seimbang dengan BUMN dan swasta yang lebih lincah.
- Minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik (dalam hal ini pemerintah daerah), walaupun ada perhatian lebih, itupun masih harus menghadapi gajalan politik, karena interpretasi yang keliru dari politisi DPRD dalam memahami peraturan, akibatnya proses penguatan permodalan BUMD menjadi tidak efisien.

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUMD/Perusahaan Daerah yang ada di propinsi Riau khususnya menunjukkan pentingnya pengelolaan penyertaan modal (investasi) untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva, mewujudkan efisiensi dan meningkatkan kinerja keuangan. Penyertaan modal yang diwujudkan dalam bentuk ekuitas merupakan kategori modal sendiri. Jika pemanfaatan modal sendiri tepat maka diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Chen (2002) bahwa modal yang tidak berasal dari pinjaman (*zero debt*) merupakan berita positif untuk meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan.

Pengelolaan penyertaan modal jika diwujudkan dalam bentuk investasi produktif pada suatu perusahaan akan menciptakan tingkat pengembalian yang produktif dan efektif. Apalagi penyertaan modal yang ada dalam BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau yang relatif besar yang diterima dari pemegang

saham rata-rata setiap tahun. Kondisi tersebut semestinya mampu merangsang kegiatan investasi oleh manajemen dengan cara melakukan pengelolaan penyertaan modal sebagai basis untuk menumbuhkan investasi dalam bentuk aktiva tetapnya agar tingkat pengembalian lebih cepat. Logikanya, bahwa tingkat pertumbuhan investasi dan pengembalian investasi dapat menjelaskan persamaan *pricing* dengan jelas (Qing, Vassalau and Yuhang, 2000). Kondisi tersebut akan terjadi kalau tata kelola terhadap penyertaan modal untuk pertumbuhan aktiva, penciptaan efisiensi dan peningkatan kinerja keuangan dilakukan dengan konsisten oleh manajemen BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Kebaruan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pentingnya penyertaan modal yang dikaitkan dengan variabel tingkat pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Sementara selama ini penyertaan modal (investasi) lebih banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan dan pertumbuhan aktiva dan masih belum ada dikaitkan dengan efisiensi. Di samping itu keterkaitan penyertaan modal (investasi) dengan variabel pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan pada obyek penelitian perusahaan-perusahaan swasta dan belum banyak menyentuh Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian diharapkan penelitian ini lebih komprehensif mengkaji pentingnya penyertaan modal yang berperan dapat mendorong pertumbuhan aktiva, menciptakan efisiensi dan berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

- H1 : Penyertaan modal yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan akan mendorong tingginya kinerja keuangan.

- H2 : Pertumbuhan aktiva yang tinggi akan berkemampuan meningkatkan kinerja keuangan.
- H3 : Efisiensi yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja keuangan.
- H4 : Penyertaan modal yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dgn cara memperkecil biaya akan berpotensi tinggi menciptakan efisiensi.
- H5 : Pertumbuhan aktiva yang produktif akan berpeluang besar mendorong peningkatan efisiensi.
- H6 : Penyertaan modal yang digunakan untuk investasi akan memiliki daya dorong tinggi menciptakan pertumbuhan aktiva.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMD/Perusahaan Daerah dengan data penelitian 2004-2008 di propinsi dan kabupaten/kota di Riau yang memiliki basis usaha dan pelayanan publik selain sektor perbankan dan Air Minum (PDAM)

Studi pada BUMD di Propinsi Riau, adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Independen. Guna mempermudah pengumpulan data untuk mendukung kelancaran analisis akan menggunakan sumber data berupa annual report perusahaan BUMD dan Perusahaan Daerah di propinsi dan kabupaten/kota Riau sejak tahun buku 2004-2008.

Di samping data sekunder yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini, maka peneliti akan hadir di lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dan atau penyebaran kuesioner secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan keberadaan BUMD/Perusahaan Daerah dengan fokus utama jajaran direksi manajemen BUMD. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang eksistensi BUMD dalam kegiatan usaha maupun pelayanan publik, sehingga dapat memperkuat dan mempertajam jawaban atas hipotesis penelitian yang diajukan.

HASIL

Guna mendukung hasil-hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini, telah disebarkan angket terbuka kepada para direktur BUMD/Perusahaan Daerah. Namun dari 11 (sebelas) angket yang disebar, hanya yang dikembalikan 6 (enam) angket dengan pengisian tidak lengkap. Akan tetapi setidaknya-tidaknya dapat memberikan tambahan informasi guna mempertajam temuan hasil penelitian ini.

Penelitian ini supaya menjadi lebih terarah dan jelas, perlu dijelaskan variable-variabel yang diteliti dengan indikator sebagai pengukurannya, sebagaimana Tabel 2.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah Analisis Jalur – *Path Analysis*, yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan

Tabel 1. BUMD/Perusahaan Daerah menjadi sensus kajian penelitian adalah Daftar BUMD/Perusahaan Daerah Propinsi dan Kab/Kota Riau

BUMD/PERUSAHAAN DAERAH	JENIS USAHA	KEPEMILIKAN
PT PIR	Jasa & Investasi	Pemprop. Riau
PT RPW	Listrik/Energi	Pemprop. Riau
PT RPT	Pengeboran Minyak	Pemprop. Riau
PT RAL	Jasa Penerbangan	Pemprop. Riau
PT PER	Jasa	Pemprop. Riau
PT SPR	Jasa dan Perdagangan	Pemprop. Riau
PD PKP	Jasa	Pemko Pekanbaru
PT PDUM	Jasa & General Trading	Pemko Dumai
PD PDB	Jasa Kepelabuhan	Pemko Dumai
PT BLJ	Jasa & General Trading	Pemkab Bengkalis
PT SJTV	Jasa Penyiaran Publik	Pemkab Bengkalis

(Sumber: Data Olahan, 2010)

Tabel 2. Variabel Penelitian Dependen dan Independen

Variabel	Rumus
Penyertaan Modal (X)	$Equity/Total\ Assets$
Pertumbuhan Aktiva (Y ₁)	$\Delta Fixed\ Asset$
Efisiensi (Y ₂)	$Total\ Cost/Sales$
Kinerja Keuangan (Y ₃)	$Net\ Income/Equity$

(Sumber: Data Olahan, 2010)

antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*). Asumsi yang mendasari *path analysis* menurut (Riduwan dan Kuncoro, 2007:2-3) adalah:

- hubungan antara variabel adalah bersifat linier, adaptif dan bersifat normal;
- hanya sistem aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang terbalik;
- variabel terikat (*endogen*) minimal dalam skala ukur interval dan rasio;
- menggunakan sampel *probability sampling* : yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel;
- *observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan *reliable*), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung;
- model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, artinya model teori yang dikaji atau diuji, dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.

Sementara model analisis yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh antar variabel *eksogen* dengan variabel *endogen* digunakan model regresi. Lebih lanjut Riduwan dan Kuncoro, menegaskan bahwa asumsi model regresi terpusat pada :

- data yang dianalisis jenis data interval atau rasio;
- data yang dipilih secara acak (*random*);
- data yang dihubungkan berdistribusi normal;
- data yang dihubungkan berpola linier;
- data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subyek yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, semakin jelas bahwa meskipun model regresi dan model *path analysis* sama-sama merupakan analisis regresi tetapi penggunaan kedua model tersebut adalah berbeda.

Adapun persamaan struktural *path analysis* dalam penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga) sub struktur yaitu:

$$\begin{aligned} Y_3 &= a_1 + b_1X + b_2Y_1 + b_3Y_2 \\ Y_2 &= a_2 + b_4X + b_5Y_1 \\ Y_1 &= a_3 + b_6X \end{aligned}$$

Keterangan:

Y₃ = Kinerja BUMD

Y₂ = Efisiensi

Y₁ = Pertumbuhan Aktiva

X = Penyertaan Modal

a = Konstanta

b = Koefisien

PEMBAHASAN

Daya Dorong Penyertaan Modal terhadap Kinerja Keuangan

Penyertaan modal yang digunakan untuk investasi akan meningkatkan kinerja keuangan. Makin banyak penyertaan modal jika digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan (Ahmad, 2004:5 -6). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyertaan modal semestinya mampu memberikan daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau menunjukkan penyertaan modal bertolak belakang dengan kinerja keuangan (hubungan negatif), artinya semakin besar penyertaan modal semakin rendah kinerja keuangan

perusahaan. Penyertaan modal pada BUMD/perusahaan Daerah tidak digunakan untuk investasi melainkan digunakan untuk menutup biaya operasional dan non operasional, karena sebagian besar BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau mengalami kerugian (Tabel 5.10). Besarnya biaya operasional dan non operasional yang tidak sebanding dengan total pendapatan yang diperoleh berakibat rendahnya kinerja keuangan BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau utamanya laba-rugi.

Hasil wawancara dengan responden yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa penyertaan modal yang diterima selama periode penelitian ini oleh BUMD/Perusahaan Daerah di Riau menurunkan kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena penyertaan modal yang diterima tidak digunakan untuk investasi yang produktif. Apalagi rasio *return on equity* (ROE) yang baik, ternyata masih perlu kerja keras manajemen yang ada sekarang untuk membuktikan kinerjanya.

Kemampuan Pertumbuhan Aktiva Meningkatkan Kinerja Keuangan

Pertumbuhan aktiva diartikan sebagai pertambahan atau pengurangan atas segala sesuatu yang disebut harta perusahaan/organisasi (Sugian, 2006: 22). Artinya, jika pertumbuhan aktiva tinggi dan produktif akan meningkatkan kinerja keuangan, sebaliknya jika pertumbuhan aktiva rendah dan tidak produktif maka akan menurunkan kinerja keuangan. Hal menarik yang dapat ditunjukkan dalam penelitian ini tentang hubungan antara pertumbuhan aktiva berupa pertumbuhan aktiva tetap dengan kinerja keuangan berupa *return on equity* (ROE) adalah positif tetapi tidak memiliki kemampuan yang kuat meningkatkan kinerja keuangan. Artinya, walaupun kecil pertumbuhan aktiva namun berkemungkinan besar memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan terutama ROE. Kondisi ini juga memberikan signal, manakala pertumbuhan aktiva tetap meningkat tentunya akan memiliki dampak meningkatkan kinerja keuangan juga. Pertumbuhan aktiva yang ditunjukkan oleh peningkatan aktiva tetap pada BUMD/Perusahaan Daerah di Propinsi Riau sebenarnya pertumbuhan yang semu, karena besarnya pertumbuhan aktiva tetap lebih besar berasal dari hibah dari PT

Chevron Pacific Indonesia dibanding dengan dari hasil usaha perusahaan sendiri.

Sesuai dengan pengakuan tersirat dalam wawancara responden dalam penelitian ini, yang ditunjukkan oleh besarnya keinginan manajemen melakukan pengelolaan penyertaan modal untuk investasi aktiva tetap yang produktif agar memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap kinerja keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Kemampuan Efisiensi Meningkatkan Kinerja Keuangan

Efisiensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan biaya, artinya semakin rendah biaya semakin tinggi efisiensi dan kinerja keuangan tinggi, sebaliknya semakin tinggi biaya semakin tidak efisien dan kinerja keuangan rendah (Sawir, 2003:42). Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang digunakan lebih besar tidak sebanding dengan penghasilan/pengjualan yang berarti menunjukkan tingkat efisiensi rendah dan kinerja keuangannya rendah pula. Kontribusi efisiensi terhadap kinerja keuangan berupa *return on equity* (ROE) menunjukkan nilai hubungan yang negatif. Hal ini sesuai dengan pendekatan efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan biaya. Artinya semakin tinggi biaya yang terjadi, maka semakin tidak efisien. Kondisi inilah, yang diakui oleh responden dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa seberapa pun besarnya dana yang masuk pada BUMD/Perusahaan Daerah di Riau ini baik berupa penyertaan maupun dari pendapatan operasi cenderung digunakan tidak terkendali. Akibatnya sering terjadi pemborosan biaya dan tentunya berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Keadaan ini terjadi karena minimnya kompetensi SDM dalam operasional dalam hal pengelolaan BUMD/Perusahaan daerah di Riau. Hal itu juga dapat dilihat rasio efisiensi rata-rata yang nilainya di atas 100%.

Potensi Penyertaan Modal Menciptakan Efisiensi

Penyertaan modal yang tinggi akan menciptakan efisiensi apabila penyertaan modal itu digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif. Artinya semakin besar penyertaan modal itu digunakan untuk meningkatkan investasi produktif yang diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan dan mengendalikan biaya, maka akan terjadi tingkat efisiensi yang tinggi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini bahwa hubungan penyertaan modal dengan efisiensi memiliki hubungan yang negatif. Namun hasil penelitian ini ternyata penyertaan modal berpotensi tinggi menciptakan efisiensi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Riau. Makna yang bisa diungkapkan di sini tentunya sejalan dengan hasil wawancara dengan responden yang dapat dipercaya, yang menyatakan bahwa manakala terjadi penambahan penyertaan modal telah memberi peluang yang sangat besar untuk melakukan pemborosan biaya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku organisasi BUMD/Perusahaan Daerah di Riau cenderung kurang *frudent* (hati-hati) dalam pengelolaan modal/penyertaan modal (investasi dari pemegang saham). Jumlah penyertaan modal yang rata-rata setiap tahun dikucurkan dengan nilai yang relatif cukup besar yang ditunjukkan oleh nilai ekuitas yang cenderung meningkat, ternyata tidak cukup mampu mengendalikan pengeluaran biaya secara total, bahkan biaya tersebut cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siagian (2004) yang menyatakan bahwa penggunaan *input*/investasi belum optimal sehingga mengakibatkan tingkat efisiensi rendah pada pabrik-pabrik gula milik BUMN. Untuk diketahui temuan empiris ini merupakan temuan khusus pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau pada periode pengamatan 2004-2008.

Peluang Pertumbuhan Aktiva Menciptakan Efisiensi

Pertumbuhan aktiva yang tinggi menunjukkan ada tambahan investasi yang akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Jika peningkatan pendapatan lebih besar dari peningkatan biaya tentunya akan meningkatkan efisiensi. Hal ini sejalan dengan pengungkapan Ahmad (2004:2) bahwa tujuan melakukan investasi dalam aktiva riil adalah untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan guna mempermudah mengkonversi dan memutar suatu aktiva menjadi uang dengan biaya rendah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan aktiva tidak dapat meningkatkan efisiensi karena

pertumbuhan aktiva pada BUMD/Perusahaan Daerah sebagai akibat dari adanya hibah dari PT Chevron Pasific Indonesia yang merupakan mesin tua dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga biaya operasional perusahaan menjadi tinggi. Hubungan pertumbuhan aktiva dalam penelitian ini berupa pertumbuhan aktiva tetap dengan efisiensi menghasilkan nilai yang juga negatif dan tidak menunjukkan peluang yang besar dalam menciptakan efisiensi. Hasil ini membuktikan kebenaran wawancara dengan responden yang dapat dipercaya bahwa memang benar pertumbuhan aktiva tetap BUMD/Perusahaan Daerah kecenderungannya sangat kecil. Atas jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tetapnya kurang produktif sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan dan bahkan justru menimbulkan biaya pemeliharaan yang besar karena merupakan aktiva tetap yang sudah tua. Hal ini menunjukkan juga penggunaan sumber daya BUMD/Perusahaan Daerah di Riau juga sangat rendah dan syarat dengan pemborosan dan cenderung tidak efisien.

Daya Dorong Penyertaan Modal Meningkatkan Pertumbuhan Aktiva

Penyertaan modal yang digunakan untuk melakukan investasi dalam aktiva akan meningkatkan produktivitas aktiva itu sendiri yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, jika penyertaan modal lebih banyak digunakan untuk menutupi biaya-biaya operasional perusahaan tanpa pengendalian yang baik, akan menciptakan inefisien dan menurunkan kinerja perusahaan. Hal senada diungkapkan oleh Ahmad (2004: 204) tujuan investasi aktiva adalah untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva produktif dan perkembangan pendapatan yang lebih besar.

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau ternyata berbanding terbalik, bahwa pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva tetap tidak kuat atau memiliki daya dorong sangat rendah dan berkontribusi negatif. Artinya setiap penambahan penyertaan modal yang dilakukan justru akan memberikan dorongan untuk tidak meningkatkan pertumbuhan aktiva tetap pada BUMD/Perusahaan Daerah di

Riau. Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden yang dapat dipercaya, ternyata memang setiap terjadi penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham (pemerintah daerah) lebih banyak dimanfaatkan untuk pengeluaran-pengeluaran operasional dan relatif sedikit dipergunakan untuk investasi dalam aktiva tetap. Bila dikaitkan dengan konsep dan teori yang ada bahwa setiap penambahan modal atau investasi pada suatu organisasi bisnis atau perusahaan semestinya memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan aktiva secara umum dan aktiva tetap secara khusus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad (2004: 4) investasi yang dipersamakan penyertaan modal dalam penelitian ini, investor dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau hartanya tidak merosot nilainya. Temuan empiris ini terjadi khusus pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Kenyataan yang terjadi pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau, memang ada BUMD/Perusahaan daerah tersebut yang setiap tahun anggaran memperoleh tambahan penyertaan modal dan ada juga yang tidak memperoleh tambahan penyertaan modal. Sementara yang tidak memperoleh tambahan penyertaan modal lebih memfokuskan pembiayaan operasional daripada penambahan aktiva tetapnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyertaan modal berdaya dorong yang tinggi terhadap kinerja keuangan tetapi penyertaan modal bertolak belakang dengan kinerja keuangan (hubungan negatif). Keadaan ini membuktikan bahwa, jika penyertaan modal dilakukan penambahan/peningkatan ternyata tidak akan dapat meningkatkan kinerja keuangan, karena tambahan penyertaan modal diindikasikan lebih banyak dipergunakan untuk pengeluaran biaya-biaya operasional sehingga biaya menjadi besar dan kinerja keuangan yang diwujudkan oleh laba menjadi rendah bahkan merugi semakin besar pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Hubungan positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan aktiva terhadap kinerja keuangan, walaupun belum berkemampuan meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini memberikan informasi yang berarti bahwa peningkatan/pertumbuhan aktiva pada BUMD/

Perusahaan Daerah di propinsi Riau bersifat semu karena lebih disebabkan oleh adanya hibah dari PT Chevron Pasific Indonesia pada PT RPW berupa mesin pembangkit yang sudah tua dan bukan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kegiatan investasi dari usahanya. Akibatnya sangat besar membutuhkan biaya perawatan dan akan sangat berdampak rendahnya kinerja keuangan BUMD/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Efisiensi dalam penelitian ini mampu meningkatkan kinerja keuangan, walaupun hubungan efisiensi terhadap kinerja keuangan menunjukkan hubungan terbalik (hubungan negatif). Hal ini menunjukkan BUMD/Perusahaan Daerah telah terjadi inefisien. Artinya antara biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Penyertaan modal dalam penelitian ini berpotensi tinggi menciptakan efisiensi, akan tetapi masih mempunyai hubungan terbalik (hubungan negatif). Artinya, semakin dilakukan penambahan penyertaan modal berarti semakin memunculkan inefisiensi yang lebih besar pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Pertumbuhan aktiva dalam penelitian ini tidak memiliki peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, sehingga lebih banyak aktiva yang tidak produktif serta sangat kecil pertumbuhannya. Sementara biaya pemeliharaan aktiva cenderung tetap dilakukan dan bahkan berpotensi mengalami kenaikan karena banyaknya aktiva yang sudah tua. Akibatnya pertumbuhan aktivapun tidak mampu meningkatkan efisiensi secara nyata dan menggambarkan kontribusi yang negatif bagi efisiensi pada BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau.

Penyertaan modal belum mempunyai kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan aktiva yang ditunjukkan oleh pertumbuhan aktiva tetap. Bahkan penyertaan modal ini juga tidak memiliki daya dorong menciptakan pertumbuhan aktiva. Hal ini mengisyaratkan bahwa bila penyertaan modal dilakukan penambahan pada perusahaan BUMD/Perusahaan Daerah di propinsi Riau, maka justru akan semakin tidak ada pertumbuhan aktiva karena penambahan tersebut tidak dipergunakan untuk investasi produktif

melainkan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran (biaya) operasional perusahaan.

Saran

Menindaklanjuti hasil temuan dalam penelitian ini, yang diringkas dalam suatu kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, dapat diberikan saran-saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD/Perusahaan Daerah khususnya di propinsi Riau. Adapun saran-saran dan rekomendasi yang dimaksud terurai sebagai berikut:

Perlunya dilakukan restrukturisasi usaha (penggabungan beberapa unit usaha dalam satu divisi) dan reorganisasi (melakukan perampingan struktur organisasi) dalam upaya strategi efisiensi pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh jajaran manajemen BUMD/Perusahaan Daerah dipropinsi Riau

Perlunya penetapan *Controller* dalam struktur organisasi BUMD/Perusahaan Daerah di Propinsi Riau yang diposisikan tugas dan tanggungjawabnya langsung di bawah Direktur Utama yang berfungsi sebagai personal kunci yang kompeten melakukan *internal control* terhadap kinerja keuangan khususnya.

Perlunya strategi aliansi dengan BUMD/Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar propinsi Riau dengan tujuan *sharing* biaya, pendapatan dan spesialisasi antar sumber daya perusahaan.

Perlunya upaya gerakan bersama (Manajemen, Eksekutif dan Legislatif Daerah serta Departemen Dalam Negeri) untuk mendorong disahkannya rancangan UU BUMD/Perusahaan Daerah kepada DPR RI, agar semakin jelas payung hukum mekanisme kegiatan usaha-usaha BUMD/Perusahaan Daerah.

Pentingnya membuat *corporate plan* dan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang jelas oleh jajaran manajemen dan diinformasikan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bagi pemegang saham (PEMDA) disarankan dapat menunda penambahan penyertaan modal bila manajemen tidak menyampaikan *corporate plan* dan program kerja secara jelas dan rasional untuk diimplementasikan.

Pentingnya melakukan kerjasama dan sinergi dengan perguruan tinggi ada untuk membuat studi

kelayakan bisnis maupun penelitian dan pengembangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pentingnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen (SIM) dalam kegiatan manajerial maupun operasional.

Perlu dilakukan upaya perubahan perilaku dan sikap bagi sumber daya manusia dengan menerapkan sistem operasional dan prosedur (SOP) dan teknologi yang tegas, tepat, terukur dan terorganisasi secara profesional agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan

DAFTAR RUJUKAN

- Acuviarta. 2006. BUMD di Sarang Penyamun, *Jurnal Free List*, Bandung.
- Ahmad, dan Kamaruddin. 2004. *Dasar-dasar manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, M. 2007. Peran Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan Komisaris dalam Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Keputusan Pendanaan dan Kinerja Perusahaan *Go Public* di Indonesia: Perspektif *Agency Theory*. Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, dan Indra. 2003. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brailsford, C., Timothy, Oliver, R., Barry, and Pua, L.H.S. 2000. Theory and Evidence on the Relationship Between Ownership Structure and Capital Structure, *Journal Australian National University*.
- Brigham, F.E., and Houston, F.J. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Budisatrio, T. 2000. Implikasi Lingkungan Usaha dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Majalah Usahawan* No.6 TH XXIX Juni 2000 hal 7-16 Universitas Indonesia.
- Chandra, T. Pengaruh Environment Risk. 2006. *Corporate Strategy dan Struktur Modal terhadap Produktivitas Aktiva, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta*, Disertasi Universitas Brawijaya Malang.
- Chen, K. 2002. The Influence of Capital Structure on Company Value with Different Growth opportunities, *Journal FAME and University of Lausanne*, Swiss.
- Deininger, K., and Olinto, P. 1999. *Asset Distribution, Inequality and Growth*, World Bank.

- Departemen Dalam Negeri RI, Keputusan Menteri dalam Negeri No. 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan BUMD.
- Departemen Dalam Negeri RI, Kebijakan Umum BUMD, Dirjend. Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, 2009.
- Djohanputro, B. 2004. Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing. Jakarta: Victory Jaya Abadi.
- Djohanputro, B. 2008. *Manajemen Resiko Korporat*, PPM Manajemen, Jakarta.
- Ersan. 2009. *Best Practice* Pengelolaan BUMD: Strategi Bank Riau Dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, Makalah Seminar, 24 Januari 2009, Pekanbaru.
- Feffer, J. 2008. *28 Cara Meningkatkan Kinerja Bisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harun, J. 2007. Makna Ancaman Pusat Ke Pemerintah Daerah. *Riau Pos*, Juli 2007, Pekanbaru.
- Haryanto, T.J. 2004. Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Penelitian*.
- Iksan, A. 2007. Mencari Variabel yang Mempengaruhi Sikap Mental *Entrepreneurship* Pemerintah Kabupaten. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*.
- Kamaluddin, R. 2000. Peran dan Pemberdayaan BUMD dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, Depdagri Jakarta.
- Lee, J. 2004. The Effect of Family Ownership and management on Firm Performance, *Jurnal Texas A & M University Corpuscristi*.
- Lesmana, R., dan Surjanto, R. 2004. *Financial Performance Analyzing: Pedoman Menilai Kinerja Keuangan Untuk Perusahaan Tbk, Yayasan, BUMN, BUMD dan Organisasi Lainnya*, Edisi Pertama. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Li, Q., Vassalau, M., and Xing, Y. 2001. An Investment-Growth Asset Pricing Model, *Journal Colombia University*.
- Maksum, A. 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan, (8).
- Malkiel, Burton, G.A. 2001. Random Walk Down Wall Street, Including A life-Cycle Guide to Personal Investing, W.W Norton & Company.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis perekonomian Daerah, *Jurnal Ekoomi Rakyat*, No. 4 Juni 2002 hal 1-15.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muhardi. 2007. *Strategi Operasi untuk Keunggulan Bersaing*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nick, D. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*, Athens, Ohio University Press.
- P. Kunawangsih, T. 2007. Analisis Efisiensi Industri Rokok Go Publik, *Jurnal Media Ekonomi*. Vol. 10 No. 1 (April 2004). Hal 21-37.
- Priadi. 2008. Analisis Penyebab Rendahnya Kinerja BUMD Kabupaten Jombang Perspektif Teori Ketidaksetaraan Informasi, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rahayu, F. 2001. Sumber Keunggulan Bersaing Bidang Produksi Operasional dan Dampaknya pada Hasil Kinerja Perusahaan: Hasil Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen* Vol 1 (No.3).
- Reilly, F.K. 2002. *Investment*, Third Edition, The Dryden Press International edition. Orlando.
- Riduwan, dan Kuncoro, A.E. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (*Path Analysis*). Bandung: Alfabeta.
- Sawir, A. 2003. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, V. 2004. Efisiensi Unit-Unit Ekonomi Industri Gula Milik BUMN di Indonesia, *Jurnal Media Ekonomi*. Vol. 10 No.1, April 2004 Hal 55-70.
- Sugian, S. 2006. Kamus Manajemen (Mutu). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- Sunarsip. 2009. Membuka Belenggu BUMD, Cendekiawan Indonesia Berpikir, Jawa Pos, 13 Maret 2009.
- Zhang, Z. 2004. *Ownership, Competition, Organizational Change, and Performance: China's Experience in Privatization*, *Desertation The George Washington University*.